BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasan tentang *Non-Voters* atau Pemilih Golput saat ini dianggap sudah tidak menarik lagi, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah, biasa dan dilakukan secara terang-terangan. Tetapi dengan fenomena semakin meningkatkan jumlah mereka dari pemilu ke pemilu, bahasan *Non-Voters* atau Pemilih Golput kembali menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan wajib menjadi perhatian, serta perlu diteliti. Terutama bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Karena, hukum demokrasi selalu menempatkan partisipasi masyarakat dalam posisi terdepan, antara masyarakat dan demokrasi terdapat makna yang komplementer dan simultan, sehingga agar demokrasi berjalan secara baik partisipasi masyarakat merupakan konsekuensi logis yang harus ditumbuh kembangkan. Penguatan demokrasi lokal tidak akan tercipta jika masyarakat hanya dijadikan sebagai objek politik dan konstituen yang pasif.

Suatu bentuk partisipasi yang mudah untuk diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah

¹ Rambe Kamarul Zaman, 2016. *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*. Jakarta : Expose (PT Mizan Publika). Hal 305.

warga negara yang berhak memilih, demikian Roth dan Wilson menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo².

Demokrasi di tingkat nasional³ akan bergerak kearah yang lebih baik dan mapan jika tatanan, instrumen, konfigurasi kearifan dan kesantunan politik terbentuk terlebih dahulu di tingkat lokal. Pilkada langsung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi di aras lokal.

Sejak tahun 2015 tata kelola Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berubah, agenda Pilkada Serentak merupakan Sebuah tawaran baru yang didorong oleh keinginan pemerintah untuk mengurangi tingkat kejenuhan masyarakat karena seringnya pelaksanaan Pilkada dan menurunnya tingkat partisipasi pemilih disetiap pelaksanaan pemungutan suara⁴. Sehingga dengan demikian sangat diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak. Pilkada Serentak gelombang⁵ pertama telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015.

Begitu juga dengan perihal kampanye, pada Pilkada Serentak tahun 2015, sebahagian biaya kampanye difasilitasi oleh negara yang bersumber dari dana APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota masing-masing bertujuan agar biaya yang harus dikeluarkan Calon tidak akan terlalu besar. Pemasangan dan

² Miriam Budiarjo, 1998. *Partisipasi dan Partai Politik, : Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 8.

³ Leo Agustino, 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pustaka Pelajar, hal 17.

⁴ Dewi Sendhikasari D, 2015, "Pilkada Serentak 2015 dan Agenda Good Governance", Buletin Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri Vol. VII No. 23/I/P3DI/Desember 2015.

⁵ Karena jabatan Kepala Daerah bervariasi maka Pilkada di setting dalam beberapa gelombang, gelombang I (pertama) telah dilaksanakan pada Desember 2015 dan gelombang II pada Februari 2017, gelombang III (2018), gelombang IV (2020), gelombang V (2022), gelombang VI (2023), dan gelombang ke VII, akan dilakukan secara serentak nasional pada tahun 2027, tetapi dalam UU Pilkada terbaru, UU No. 10 tahun 2016 Pasal 201 (8) Pilkada serentak nasional dilaksanakan pada tahun 2024. Dan untuk lima tahun selanjutnya dan seterusnya, Pilkada akan dilakukan serentak secara nasional.

penyebaran alat peraga kampanye dan bahan kampanyepun ditata sedemikian rupa oleh peraturan perundang-undangan sehingga informasi dapat sampai kepada pemilih secara merata.

Target partisipasi pemilih secara nasional pada Pilkada 2015 akhirnya disepakati bersama sebesar 77,5%, yang mana pada awalnya Badan Perencanaan Pembagunan Nasional menginginkan 80%, tetapi Komisi Pemilihan Umum menginginkan 75% 6 .

Namun, dalam kenyataannya setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 tingkat kehadiran (voting turnout) masyarakat tetap saja rendah. Dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan di 9 Provinsi tidak ada satu provinsipun yang mampu mencapai target partisipasi tersebut, seperti terlihat dalam Tabel 1.1 berikut ini,

TABEL 1.1 PENGGUNA HAK PILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2015

NO.	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH*	TINGKAT PARTISIPASI	PEMILIH TIDAK MEMILIH
					(GOLPUT)
1.	Provinsi Kalimantan Tengah	K 1.994.675	J A 1.042.600 _B	AN 52,27%	47,73%
2.	Provinsi Riau	1.234.535	682.534	55,29%	44,71%
3.	Provinsi Sumatera Barat	3.545.076	2.079.063	58,65%	(41,35%)
4.	Provinsi Kalimantan Utara	447.637	277.586	62,01%	37,99%
5.	Provinsi Sulawesi Utara	1.985.879	1.274.622	64,18%	35,82%
6.	Provinsi Kalimantan Selatan	2.897.057	1.921.946	66,34%	33,66%
7.	Provinsi Bengkulu	1.450.414	969.068	66,81%	33,19%
8.	Provinsi Jambi	2.483.426	1.660.093	66,85%	33,15%
9.	Provinsi Sulawesi Tengah	1.996.754	1.392.113	69,72%	30,28%

Sumber: Rumah Pintar Pemilu KPU RI (diolah)

^{*} terdiri atas DPT, DPTb1, DPPh dan DPTb2

⁶ Rambe Kamarul Zaman, op.cit., hal. 266,

Begitu juga dengan angka partisipasi untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Sumatera Barat, tidak satupun kabupaten/kota yang angka partisipasinya diatas target partisipasi secara nasional (77,5%) dan target partisipasi secara Provinsi (dalam pelaksanaan Pilkada 2015 KPU Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan target partisipasi sebesar 75%), seperti terlihat dalam Tabel 1.2 di bawah ini ;

TABEL 1.2. PENGGUNA HAK PILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SE-PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 ANDALAS

NO.	KABUPATEN / KOTA	*JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	TINGKAT PARTISIPASI	PEMILIH TIDAK MEMILIH (GOLPUT)
1.	Kabupaten Padang Pariaman	279.482	150.521	53,86%	46,14%
2.	Kabupaten A <mark>gam</mark>	335.510	183.081	54,57%	45,43%
3.	Kabupaten <mark>T</mark> anah Datar	269.470	149.068	55,32%	44,68%
4.	Kabupaten S <mark>olok</mark>	276.633	155.903	56,36%	43,64%
5.	Kota Bukittin <mark>ggi</mark>	74.450	43.8 2 3	58,86%	(41,14%)
6.	Kabupaten <mark>Sijunjung</mark>	149.321	87.999	58,93%	41,07%
7.	Kabupaten Lima Puluh Kota	264.435	161.241	60,98%	39,02%
8.	Kabupaten <mark>Pasaman Barat</mark>	255.226	160.580	62,92%	37,08%
9.	Kabupaten P <mark>esisir Selatan</mark>	314.755	203.202	64,56%	35,44%
10.	Kabupaten Solok Selatan	113.534	76.810	67,65%	32,35%
11.	Kabupaten Pasaman	190.712	A 183,047	69,76% 70,41%	30,24%
12.	Kota Solok	46.091	32.452 /B	70,41%	29,59%
13.	Kabupaten Dharmasraya	136.810	99.73 9	72,90%	27,10%

Sumber: Rumah Pintar Pemilu KPU RI (diolah)

Dari Tabel. 1.2 dapat terlihat tingkat partisipasi di Kota Bukittinggi hanya 58,86% (pemilih golput/ *non-voters* 41,14%), terendah 5 untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat, dan juga dibawah dari angka rata-rata partisipasi di negara negara demokratis di seluruh dunia yaitu 64 %⁷. Hal ini berbeda dengan hasil

^{*} terdiri atas DPT, DPTb1, DPPh dan

⁷ Miriam Budiarjo, *op.cit.*, hal. 9,

penelitian Lipset yang menyatakan tingkat partisipasi masyarakat kota lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat desa, berdasarkan data pemilu di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat seperti Jerman, Swedia, Norwegia serta Finlandia'.

Joseph Schumpeter dalam karyanya *Capitalism, Socialism and Democracy* (1942)⁸, berpandangan bahwa, "pemilu merupakan jantungnya demokrasi" dan demokrasi itu ia gambarkan sebagai sebuah tatanan institusional sebagai cara atau mekanisme untuk mengisi jabatan Ipublik Amelalui sebuah perlombaan untuk memperoleh dukungan dari rakyat, sehingga melalui pemilu rakyat memiliki kesempatan untuk menerima atau menolak orang-orang yang akan mencalonkan diri untuk memimpin mereka.

Sumber legitimasi dari demokrasi adalah suara mayoritas dari rakyat, maka apabila rakyat tidak ikut berpartisipasi atau golput dalam pemilu maka pemimpin yang terpilih akan berkurang dan kehilangan legitimasinya. Tanpa legitimasi warga negara sesungguhnya sebuah kekuasaan tidak dapat dianggap ada.

Sebelum reformasi, basis legitimasi di Indonesia bersumber dari militer dan kekuasaan fisik, tetapi saat ini ukuran legitimasi telah bergeser ke "dukungan masif dari rakyat". Sejarahpun telah mencatat sebuah sistem harus berakhir karena rakyat sebagai pemberi mandat telah kehilangan kepercayaan kepada Presiden dan lembaga pemerintahan.

⁸ Andrew Heywood, 2014. *Politik*. Yogyakarta.Penerbit Pustaka Pelajar. Hal 356.

Hal tersebut selaras dengan pandangan Robert A. Dahl⁹ dalam tulisannya *Poliarchy : participation and oposition* (1971), menjelaskan legitimasi adalah sumber utama untuk mendapatkan kekuasaan dan legitimasi pula yang akan menentukan apakah kekuasaan akan diteruskan atau dicabut.

Maka jika dilakukan pembiaran terhadap semakin tingginya angka golput dalam pemilu, golput akan mengkristal menjadi faktor internal demokrasi yang potensial menimbulkan pembusukan demokrasi atau pembusukan politik (*Political Decay*), sehingga akan berimplikasi melumpuhkan demokrasi itu sendiri. Hal tersebut sangat tidak baik bagi perkembangan demokrasi khususnya di Indonesia. Dari paparan diatas maka kajian *non-voters* (pemilih golput) wajib menjadi perhatian dan perlu diteliti.

Leo Agustino¹⁰, menyatakan salah satu masalah dalam pemilihan langsung kepala daerah adalah menguat dan mengekalnya fenomena golput, jika kecenderungan ini dibiarkan maka budaya politik partisan yang dirancang oleh pemilihan langsung menjadi tidak berarti, ini karena apatisme rakyat yang tidak memilih dapat menularkan sikap dan perilakunya sehingga menyuburkan budaya politik apatis yang akhirnya bertolakbelakang dengan upaya pendalaman demokrasi.

Berangkat dari fenomena rendahnya tingkat partisipasi dan semakin besarnya angka pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tetapi tidak ikut memilih ke TPS pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2015 di Kota Bukittinggi, maka penelitian ini akan menelisik **mengapa**

¹⁰ Leo Agustino, 2010. Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia antara Pendalaman dan Penimbunan Demokrasi. *Jurnal Analisa Politik*. 1 (10): 2-25.

⁹ Firmanzah. 2009. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal 588.

Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kota Bukittinggi, kemudian melihat dan menganalisis bentuk atau karakter dari *Non-Voters* (Pemilih Golput) serta melihat faktor-faktor yang menjadi penyebabnya dengan menggunakan teori yang relevan.

Karena akan menjadi hal yang percuma saja jika berbagai upaya dan kajian serta skenario rancang pola tatanan Pilkada ditelaah, yang juga telah banyak menyita tenaga, waktu, tikiran dan yang juga pastinya menggunakan anggaran yang tinggi, tetapi tidak berorientasi hasil karena dalam pelaksanaan pemilu masyarakat tetap saja tidak tertarik untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Maka hal tersebut akan menjadi suatu kesia-sian belaka.

Untuk itu perlu dilakukan penelitian ini karena jika hanya dengan melihat angka-angka perolehan hasil Pilkada saja maka alasan yang melatarbelakangi mengapa pemilih golput tidak mungkin terdeteksi dengan baik sebab hasil Pilkada tidak pernah disertai dengan informasi dan alasan mengapa pemilih tidak ikut memilih.

1.2 Perumusan Masalah

Fenomena golput di Kota Bukittinggi sesungguhnya bukanlah suatu hal yang baru, pada pemilihan legislatif secara langsung tahun 2004 dan 2009 Kota Bukittinggi merupakan daerah dengan tingkat partisipasi terendah se-Provinsi Sumatera Barat, dan pada pemilu legislatif 2014 mulai membaik dengan menempati posisi dua terendah setelah Kabupaten Agam.

KEDJAJAAN

Pada Pemilukada tahun 2005 persentase pemilih tidak memilih (golput) adalah 45,85% dan Pemilukada 2010 38,52% sedangkan Pilkada tahun 2015 41,14%. Berarti rata-rata tingkat golput dalam tiga kali pelaksanaan pemilihan

kepala daerah langsung di Kota Bukittinggi adalah 41,84%, hampir setengah dari Pemilih yang terdaftar, hal ini merupakan suatu angka yang cukup mengkhawatirkan.

TABEL 1.3 PERSENTASE (%) PEMILIH GOLPUT DALAM PILEG, PILPRES DAN PILKADA LANGSUNG DIKOTA BUKITTINGGI

NO.	PEMILIHAN	TAHUN	PARTISIPASI (%)	GOLPUT (%)
1.	PILEG (DPRD KOTA)	2004	66,81 %	33,19 %
2.	PILEG (DPRD KOTA)	2009	61,04 %	38,96 %
3.	PILEG (DPROK QTA) VEF	RS12P14S A	ND60,80 %	39,2 %
4.	PILPRES (PUTARAN 1)	2004	69,06 %	30,94 %
5.	PILPRES (PUTARAN 2)	2004	62,36 %	37,64 %
6.	PILPRES	2009	67,86 %	32,14 %
7.	PILPRES	2014	65,86 %	34,14 %
8.	PEMILUKADA	2005	54,15 %	45,85 %
9.	PEMILUKADA	2010	61,48 %	38,52 %
10.	PILKADA	2015	58,86 %	41,14 %

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Kota Bukittinggi dikenal sebagai barometernya politik¹¹ di Sumatera Barat, kota kecil yang hanya mempunyai luas 25 km² ini memiliki dinamika politik yang cukup kompleks hal ini terlihat dengan banyaknya calon Walikota dan Wakil Wali Kota di Bukittinggi dan merupakan calon terbanyak se-Provinsi Sumatera Barat, yaitu diikuti oleh 5 pasangan calon yang terdiri atas 4 pasangan calon yang diusung oleh partai politik dan 1 calon dari jalur perorangan.

¹¹ Tidak ditemukan referensi yang jelas siapa yang pertama kali membuat pernyataan ini, tetapi hal ini sering diungkapkan dalam kegiatan kegiatan politik yang berlangsung di Kota Bukittinggi maupun Sumatera Barat, hal ini bisa jadi di asumsikan karena dulunya Kota Bukittinggi pernah tercatat sebagai Ibu Kota NKRI, sehingga diperkirakan tingkat dinamika politiknya sangat tinggi.

Dalam Pilkada Serentak 2015, jumlah Pemilih¹² di Kota Bukittinggi adalah 74.293 jiwa yang terdiri atas ; Daftar Pemilih Tetap (DPT) 72.311 jiwa, Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) 446 jiwa, Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) 5 jiwa, Daftar Pemilih Tetap Tambahan-2 (DPTb-2) 1.531 jiwa. Yang tersebar di 3 Kecamatan dan 24 Kelurahan dengan 232 TPS. Golput yang paling tinggi adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu 41,76%, tingkat partisipasinya secara detail sebagai berikut ;

TABEL1.4 PENGGUNA HAK PILIH PADA DPT, DPT6 1, DPPh, DPT6 2 PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015

		DPT		4	DPTb 1	3		DPPh			DPTb 2	
KECAMATAN	TOTAL	MEMILIH	TIDAK MEMILIH	TOTAL	MEMILIH	TIDAK MEMILIH	TOTAL	MEMILIH	TIDAK MEMILIH	TOTAL	MEMILIH	TIDAK MEMILIH
AUR BIRUGO TIGO BALEH	15.209	9.043	6.166	232	71	161	5	2	3	320	320	0
GUGUAK PANJANG	25.925	15.209	10.716	68	39	29	0	0	0	571	571	0
MANDIANGIN KOTO SELAYAN	31.177	17.862	13.315	146	61	85	0	0	0	640	640	0
TOTAL	72.311	42.114	30.197	446	171	275	5	2	3	1.531	1.531	0
%	100%	58,24%	41,76%	100%	38,34%	61,66%	100%	40%	60%	100%	100%	0%

Sumber: KPU Kota Bukittinggi (diolah)

¹² Berdasarkan PKPU No. 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran dan Data Pemilih, DPT (Daftar Pemilih Tetap) adalah, Pemilih hasil pemutakhiran DPS,

DPTb-1 (Daftar Pemilih Tambahan-1), Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalamDPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan KTP, KK, Paspor, dan/atau Surat Keterangan Domisili dari desa/kelurahan paling lama 7 hari setelah pengumuman DPT,

DPTb-2 (Daftar Pemilih Tambahan-2) adalah Pemilih yang pada hari pemungutan suara belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 dapat menggunakan hak pilihnya dengan menujukkan KTP, Pasport atau identitas kependudukan lainnya, dan dimasukkan kedalam DPTb-2

DPPh (Daftar Pemilih Pindahan) adalah, Pemilih yang telah terdaftar dalam DPTb-1 disuatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak nya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dapat mengunakan hak pilihnya di TPS lain di Provinsi dan/atau kabupaten atau Kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalan satu wilayah dengan melaporkan kepada TPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah : menjalankan tugas di tempat lain pada saat pemungutan suara, menjalani rawat inap di Rumah Sakit atau Puskesmas dan keluarga yang mendampingi, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, tugas belajar, pindah domisili dan tertimpa bencana alam.

Banyak kajian yang telah dilakukan tentang *non-voters* atau pemilih golput namun, dari semua kajian yang ada, terdapat satu hal yang mungkin kurang mendapat perhatian selama ini, yaitu tentang salah satu **penyumbang golput** terbesar adalah banyaknya jumlah form C6¹³ yang kembali sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara dan jumlahnya cukup signifikan.

Form C6 (surat pemberitahuan) dibagikan oleh KPPS kepada Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT 4 hari sebelum pelaksanaan pemilihan suara dan jika petugas KPPS tidak menemukan pemiliknya maka H-1 Pemilihan, form C6 harus dikembalikan lagi ke KPU Kota Bukittinggi.

Pemilih yang tidak ditemukan sehingga C6 nya dikembalikan adalah sebanyak 9.313 lembar. Jika dilihat dari jumlah golput (non-voters) secara keseluruhan sebesar 41,76% (30.107 pemilih) berarti C6 sudah menyumbang 33% dari angka golput secara keseluruhan. Berarti sebelum pelaksanaan Pemilihan berlangsung, angka golput sudah dipastikan sebesar 9.313 pemilih. Sehingga beberapa kajian tentang non-voter (golput) sebelumnya perlu dikaji kembali dengan menambahkan fenomena yang ada di Kota Bukittinggi, dengan menambahkan form C6 yang kembali sebagai salah satu faktor penyebab tinggginya angka non-voter (golput) dalam Pemilu.

TABEL 1.5 FORM C6 KEMBALI KE KPU KOTA BUKITTINGGI

NO.	KECAMATAN	JUMLAH		
1.	AUR BIRUGO TIGO BALEH	2.048		
2.	GUGUAK PANJANG	3.317		
3.	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	3.949		
	TOTAL	9.313		

Sumber: KPU Kota Bukittinggi

¹³ C6 adalah Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih berdasarkan Pasal 5 (1)(i) PKPU No. No. 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pada awalnya ada beberapa asumsi yang terbangun bahwa "partisipasi di Kota Bukittinggi akan tinggi dalam Pilkada Serentak tahun 2015", hal ini dilatar belakangi oleh:

Pertama, semua partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Kota Bukittinggi mempunyai Calon yang di usung sebagai pasangan Walikota dan Wakil Walikota (tabel. 1.5), jadi asumsinya dengan semua partai politik memiliki calon sudah seharusnya dapat meningkatkan angka partisipasi saat Pemilihan. Karena partai politik tentu lebih mudah dalam mengerakkan semua konstituennya untuk memilih calon yang diusung oleh partai atau gabungan partai tersebut, tetapi dengan partisipasi yang cukup rendah sepertinya partai politik yang ada tidak mampu menggiring kostituennya ke TPS pada hari pemungutan suara.

Daftar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota serta partai pengusungnya dapat terlihat dalam Tabel 1.6 berikut;

TABEL 1.6 DAFTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015

No Urut	CALON WALIKOTA	WALIKOTA		Perolehan Kursi di DPRD
1.	H. TASLIM, S.SIUNTUK	HEMARFENDI Dt. BASA	1. PAN BANGSA 2. PKS	3
	TOK	BALIMO	2. PKS	3
2.	H. FEBBY Dt. BANSO NAN	ZUL FIKAR RAHIM	1. PPP	3
	PUTIAH, SST.Par		2. PKB	1
			3. HANURA	1
3.	dr. H. HARMA ZALDI, S.Pb	Ir. HJ RAHMI BRISMA	1. GOLKAR	4
			2. NASDEM	1
4.	M. RAMLAN NURMATIS SH Dt. NAN BASA	IRWANDI, SH Dt. BATUJUAH	PERORANGAN	DUKUNGAN 14. 749 KTP
5.	H. ISMET AMZIZ, SH	Drs. ZULBAHRI MAJID M.Pd	1. DEMOKRAT	4
			2. GERINDRA	4
			3. PDI P	1
	TOTAL			25 KURSI

Sebagaimana diamanatkan oleh pasal 59 (2) bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan suara sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Dengan demikian untuk Kota Bukittinggi yang mampunyai 25 kursi di DPRD minimal untuk mengusung calon Walikota dan Wakil Walikota harus mempunyai minimal 4 kursi di DPRD. Rekapitulasi jumlah perolehan suara sah dan kursi partai politik dalam pemilu anggota DPRD Kota Bukittinggi dapat dilihat dalam *lampiran 2*.

Setelah pelaksanaan penghitungan suara pasangan M. Ramlan Nurmatias SH Dt. Nan Basa dan Irwandi, SH Dt. Batujuah dari jalur Perorangan dengan total dukungan KTP sebanyak 14.749 berhasil memperoleh suara terbanyak di Kota Bukittinggi 17.870 suara atau 41,84 %,

TABEL 1.7 JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI DALAM PILKADA SERENTAK TAHUN 2015

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	% SUARA
1.	H. TASLIM,S.Si dan H. MARFENDI Dt. BASA BALIMO	7.074	16,59 %
2.	H. FEBBY, SST. Par Dt. BANGSO NAN PUTIAH dan ZUL IFKAR RAHIM	1.508	3,54%
3.	dr. H. HARMA ZALDI, S.Pb dan Ir. Hj. RAHMI BRISMA	4.468	10,52 %
4.	M. RAMLAN NURMATIAS, SH Dt. NAN BASA dan IRWANDi, SH Dt. BATUJUAH	17.870	41,80 %
5.	H. ISMET AMZIS, SH dan Drs. H. ZULBAHRI M, M.Pd	11.786	27,55 %
	Jumlah Suara Sah Calon	42.706	100%

Sumber : KPU Kota Bukittinggi

Dengan berhasilnya pasangan Walikota dan Wakil Walikota dari jalur perorangan mencapai suara terbanyak, apakah hal ini juga menunjukkan bahwa partai politik tidak hanya tidak mampu menggiring konstituennya ke TPS pada hari pemunggutan suara namun hal ini bisa jadi juga menunjukkan telah berkurangnya animo masyarakat terhadap calon yang merupakan usungan partai politik tersebut¹⁴.

Menurunnya tingkat kehadiran pemilih juga mengilustrasikan menurunnya kemampuan partai-partai untuk menggalang dukungan pemilih 15. Sebagai contoh, Wettenbergh menemukan bahwa, di 19 negara demokrasi liberal, kehadiran pemilih telah menurun rata-rata 10% persen antara 1950-an hingga 1990-an, tren ini terutama mencolok di AS, Eropa Barat, Jepang dan Amerika Latin. Akibat dari terus membesarnya tingkat sentimen anti partai kemampuan partai untuk memobilisasi pemilih dalam pemilu juga menurun drastis 16, yang pada akhirnya mengakibatkan meningkatnya angka pemilih golput

Andrew Heywood¹⁷, juga menyebutnya sebagai "pembelotan partisan", yaitu sebuah penurunan tingkat penyelarasan dan pengidentifikasian diri masyarakat dengan sebuah partai Jini Jmengimplikasikan penurunan tajam terhadap dukungan pada partai dan semakin banyaknya pemilih yang menjadi pemilih mengambang (bahkan tidak memilih/golput). Ketika loyalitas partai

¹⁴ Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh partai politik sudah menurun dan semakin berkurangnya jumlah anggota resmi partai politik, kerena partai di anggap tidak mampu lagi mewakili rakyat dan tidak mampu lagi menyelasaikan masalah di parlemen, anggota sering korup, cederung lebih mengutamakan kepentingan sendiri dan selalu mengejar pusat kekuasaaan. Kaum muda lebih suka mengembangkan *civil society kelompok kepentingan NGO* dimana mereka pun dapat secara langsung atau sebagai faktor utama mempengaruhui proses menentukan kebijakan. (dikutip dari Prof.Miriam Budiarjo 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal 421.)

¹⁵ Andrew Heywood, *op.cit.*, hal. 425,

¹⁶ Sigit Pamungkas, 2011. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta. Institute for Democracy and Welfarism. Hal 228.

¹⁷ Andrew Heywood, *Ibid, h.* 380

melemah, perilaku pemilih menjadi semakin mudah berubah dan membawa kepada ketidak pastian, penyebab utama pembelot partisan ini adalah meluasnya pendidikan, meningkatnya mobilitas sosial dan meningkatnya ketergantungan kepada televisi sebagai salah satu sumber informasi publik.

Hal tersebut juga selaras dengan studi yang dilakukan oleh SMCR (Saiful Mujani *Reseach* and *Consulting*), pada Mei 2017 melakukan wawancara terhadap 1.500 responden di 34 provinsi yang dipilih secara random tetang kepercayaan publik terhadap lembaga negara basilnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik ternyata sangat rendah yaitu 56 % dan kepada DPR 63%.

Kedua, asumsinya Bukittinggi adalah kota kecil dengan luas administratif lebih kurang 25 km² dengan 3 kecamatan dan 24 kelurahan yang tersebar di 232 TPS, setiap wilayah mudah dijangkau, maka dengan wilayah yang tidak terlalu luas akan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan memudahkan kegiatan sosialisasi dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi, partai politik atau pun pihak lain yang berkepentingan dengan pelaksanaan Pilkada. Wilayah administrasi yang tidak terlalu luas tersebut juga memudahkan petugas dalam mendistribusikan form C6 kepada Pemilih J

Jika dilakukan simulasi kalkulasi sosialisasi oleh penyelenggara¹⁸ (yang terdiri dari 2.098 orang) kepada pemilih (72.311 orang), maka 1 orang penyelenggara cukup men-sosialisasi kepada 34 orang Pemilih saja maka angka partisipasi pemilih di Kota Bukittinggi sudah mencapai 100%.

¹⁸ Penyelenggara Pilkada yang dimaksud disini adalah terdiri atas Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Bukittinggi 30 orang, PPK dan Sekretariat 30 orang, PPS dan Sekretariat 144 orang dan KPPS 1.624 orang, Panwaslu dan jajarannya sebanyak 270 orang (15 orang Panwaslih dan sekretariat, 21 orang Panwascam dan Sekretariat, 24 orang PPL dan 232 orang Pengawas TPS) maka jika dijumlah hasilnya adalah 2.098 orang.

Syaiful Mujani dkk, ¹⁹ pernah mengkaji tentang tingkat partisipasi pemilih diwilayah perkotaan-pedesaan dalam hasil kajiannya memaparkan bahwa pada awalnya ada asumsi perbedaan wilayah tinggal ini mungkin berpengaruh terhadap partisipasi politik karena partisipasi sangat mungkin terkait dengan mobilitas-mobilitas oleh agen-agen atau aktor-aktor politik, hal ini disebabkan oleh mobilisasi massa kemungkinan mudah terjadi di perkotaan berkat tersedianya sarana dan prasarana mobilisasi lebih besar dan wilayah yang harus di jangkau juga lebih kecil jika di bandangkahil dengan milayah pedesaan, namun hasil studinya menunjukkan hal yang berbeda, warga yang tinggal di daerah pedesaan lebih banyak yang datang ke TPS ketimbang warga yang tinggal di wilayah perkotaan. Temuan tersebut telah membantah asumsi sebelumnya. Studi ini dilakukan oleh Syaiful Mujani dkk, dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, sedangkan penelitian ini dilakukan saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, dimana hal seperti informasi politik, kampanye, pengetahuan akan calon cukup baik bagi Pemilih di Kota Bukittinggi.

Maka berdasarkan pemaparan realitas diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah DJAJAAN

"Mengapa Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kota Bukittinggi ? "

¹⁹ Saiful Mujani, Liddle, R. William; Ambardi, Kuskridho (2011), *Kuasa Rakyat : Analisis tentang Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*, Penerbit Mizan Publika Jakarta. Hal 220.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

Untuk menjelaskan dan menganalisa mengapa Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tidak menggunakan hak pilihnya dan bagaimana bentuk atau karakter pemilih golput serta apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya *non-voters* (pemilih golput) dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kota Bukittinggi

1.4 Manfaat Penelitian NIVERSITAS ANDALAS

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pengembangan teori ilmu politik di bidang kepemiluan khususnya kajian tentang pemilih yang tidak memilih (Pemilih Golput) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para peneliti selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para praktisi politik didunia politik praktis, baik dalam hal pengambilan kebijakan, strategi pegembangan partai politik atau kelompok kepentingan lainnya serta bagi pihakpihak yang mempunyai kepentingan terhadap Pilkada, serta dapat menjadi perhatian dan acuan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dan KPU Kota Bukittinggi dalam pengambilan kebijakan strategis.